

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Hubungan Internasional

Hubungan internasional atau *International Relation* sudah ada sejak saat dimana terdapat interaksi antara aktor dengan aktor lainnya ataupun juga anggota masyarakat dengan anggota masyarakat lainnya. Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan bagi suatu negara dan seperti yang dikatakan sebelumnya hubungan internasional merupakan suatu hal yang dinamis dengan mengikuti dan menyesuaikan dengan zamannya. Hal ini tercermin dari interaksi atau hubungan yang semula tidak sedemikian kompleks kemudian yang sekarang telah berkembang pada yang lebih modern beriringan dengan semakin kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional. Faktor ketergantungan yang muncul dalam masyarakat internasional juga menjadi alasan hubungan internasional menjadi suatu keharusan dan sehingga tidak memungkinkan suatu negara berdiri tanpa bantuan dari negara lain atau mengisolasi dirinya.

Hubungan Internasional merupakan studi yang mempelajari hubungan dan interaksi antar negara yang meliputi aktivitas dan kebijakan pemerintah, organisasi internasional, organisasi non pemerintah dan perusahaan multinasional (Jackson & Sorensen, 2014 : 4).

Terdapat banyak orang, pakar, ahli yang mengemukakan mengenai definisi Hubungan Internasional atau apa yang dimaksud dengan Hubungan Internasional.

Diantaranya adalah seperti yang diungkapkan oleh Karen Mingst dalam buku yang berjudul Pengantar Hubungan Internasional menyatakan bahwa

“Hubungan internasional adalah studi tentang interaksi antar berbagai aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, termasuk negara bagian, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, entitas sub nasional seperti Pemerintah daerah dan individu” (Wijatmadja, 2016 : 4-5).

Menurut Bakry, “Hubungan Internasional mengkaji interaksi antara aktor-aktor dalam hubungan internasional, baik itu *state actor*, maupun *non-state actor* meliputi negara bangsa, organisasi internasional dan perusahaan multinasional, studi hubungan internasional mencoba menjelaskan berbagai interaksi antarnegara, masyarakat dan institusi yang melintasi batas-batas nasional, mulai dari studi tentang perang, damai hingga kerja sama ekonomi dan konflik lingkungan” (Bakry, 2016 : 59).

Kedua definisi diatas menekankan pada pola interaksi yang terdapat dalam hubungan internasional. Pola interaksi dalam hubungan internasional dapat berupa kerja sama, persaingan atau pertentangan yang terbentuk dari segala interaksi yang dilakukan oleh para aktor baik itu *state actor* maupun *non state actor* dalam pergaulan masyarakat internasional. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh K.J Holsti dalam bukunya “Politik Internasional : Suatu Kerangka Analisis”, Hubungan Internasional atau *International Relation* selalu berkaitan dengan interaksi, interaksi yang beragam yang melintasi batas-batas nasional atau batas yuridis, baik interaksi yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh negara antar bangsa.

Terdapat tiga bentuk interaksi yang terdapat dalam pokok bahasan studi internasional yaitu hubungan – hubungan antar negara, bukan negara atau hubungan-hubungan trans nasional yang melintasi perbatasan dan beroperasinya sistem secara keseluruhan dimana dalam sistem ini negara dan masyarakat menjadi komponen utamanya (Wijatmadja 2016 : 5), hal ini yang menjadikan studi

hubungan internasional mempelajari beragam bidang seperti politik (internasional), ekonomi (internasional), organisasi internasional (OI), organisasi antarpemerintah (IGO), organisasi non-pemerintah internasional (INGO) organisasi non-pemerintah (NGO) dan perusahaan multinasional (MNC), hukum internasional, teori hubungan internasional dan lain sebagainya. Pengakuan terhadap studi hubungan internasional pertamakali timbul karena kesadaran akan pentingnya untuk mencegah peperangan dan untuk terselenggaranya ketertiban duani hal ini diakibatkan karena adanya keprihatinan yang dihasilkan oleh Perang Dunia Pertama yang telah banyak menelan korban dan mengakibatkan banyak kerusakan secara materil (Darmayadi, 2015 : 19).

Mengutip dari buku Wijatmadja dengan judul “Pengantar Ilmu Hubungan Internasional”, Ruang lingkup studi hubungan internasional secara tradisional merupakan negara sebagai aktor hubungan internasional beresta kepentingan-kepentingannya, terutama masalah keamanan nasional dan kekuasaan (*power*). Oleh karena itu pada saat itu yang menjadi topik utama dalam Hubungan Internasional tak jauh dari krisis antar negara, perlombaan senjata, perang, sebab-sebab perang dan lain sebagainya. Pokok bahasan hubungan internasional kemudian bergeser ke arah diplomasi, hukum internasional, *world order*, *gender*, lingkungan dan lain sebagainya.

Aktor dalam hubungan internasional adalah siapa saja yang memainkan peran dalam hubungan internasional yang mencaup negara dan bukan negara. Berikut adalah diantaranya:

- a. Negara – negara dalam interaksinya dengan aktor-aktor dalam hubungan internasional mengejar kepentingan nasionalnya
- b. Organisasi Internasional – suatu institusi yang didalamnya terdapat dua negara atau lebih dengan aktifitas yang melampaui batas-batas negara.
- c. Perusahaan Multinasional – perusahaan yang memiliki beberapa cabang di berbagai negara dan memiliki kantor pusat di negara induk.
- d. Teroris – istilah yang merujuk kepada tindakan atau ancaman penggunaan kekerasan oleh seseorang atau kelompok dengan tujuan untuk menciptakan ketakutan.
- e. Individu. (Wijatmadja, 2016 : 100-115)

2.1.2. Kepentingan Nasional

Pada Hubungan Internasional terdapat elemen yang berkorelasi dengan satu sama lain yang berkontribusi dalam perkembangan hubungan internasional itu sendiri, diantaranya adalah aktor (*actor*), kepentingan (*interest*) dan kekuasaan (*power*). Hal inilah yang membuat hubungan internasional seringkali dikaitkan dengan kepentingan nasional atau *national interest* yang dimana pola interaksi yang terbentuk tak luput dari kepentingan nasional masing-masing pelaku interaksi tersebut. Terciptanya kepentingan nasional dilandasi oleh keberagaman yang dimiliki oleh tiap-tiap negara yang terbatas dan juga berbeda-beda dari negara satu dengan yang lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh karakter, budaya, sejarah, sumber daya dan lainya yang berbeda-beda. Kepentingan nasional terbagi menjadi 4 (empat) jenis yaitu ideologi, keamanan, ekonomi, dan prestise.

Menurut Hans J Morgenthau sebagai orang pertama yang mengungkapkan apa yang dimaksud dengan kepentingan nasional adalah alat untuk mencapai dan mengejar kekuasaan karena dengan kekuasaan, suatu negara dapat mengontrol negara lain. Konsep kepentingan nasional menurut Morgenthau adalah kemampuan bagi suatu negara untuk mempertahankan dan melindungi identitas fisik, politik dan kultur negara tersebut yang tentunya dari gangguan negara lain.

Hubungan diplomasi yang baik antar negara merupakan bentuk dari kepentingan nasional atau *national interest*. Adapun cara pencapaiannya dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya adalah pembangunan berkelanjutan, program-program pemerintah, kerja sama internasional dan lain sebagainya. Kepentingan nasional sangatlah penting dalam keberlangsungan hubungan internasional, karena kepentingan nasional merupakan bagian dari hubungan internasional yang fungsinya adalah tak lain untuk mempertahankan keberlangsungan dan eksistensi suatu negara melalui berbagai sektor dan bidang seperti politik, ekonomi, keamanan, sosial-budaya dan lain sebagainya.

Kepentingan nasional mengutip dalam buku Wijatmadja dengan judul “Pengantar Ilmu Hubungan Internasional” bisa didefinisikan dengan berbagai kriteria. Pertama adalah kriteria ekonomi, kebijakan yang memperkuat posisi ekonomi negara dimasukan kedalam kepentingan nasional. Kedua adalah kriteria ideologi, kriteria ideologi mempengaruhi negara untuk menggunakan cara tertentu dalam memandang dunia dan mendefinisikan kepentingan nasionalnya. Ketiga adalah kriteria keamanan militer, negara melihat keamanan militer sebagai penentu kepentingan nasionalnya karena keamanan militer (kekuatan) memainkan peran

penting dalam hubungan internasional. Keempat adalah kriteria moralitas dan legalitas yang merupakan suatu isu yang sering diperdebatkan dalam menentukan kepentingan nasional. Kelima adalah kriteria lain-lain yang meliputi masalah budaya, etnik, ras dan lain sebagainya (Wijatmadja, 2016 : 127-128).

2.1.3. Hubungan Bilateral

Hubungan Bilateral merupakan hubungan yang terjadi antara dua negara atau dua pihak yang bekepentingan. Dalam hubungan bilateral terdapat aktor yang berperan didalamnya yaitu negara. Aktor disini tidak sebatas pemerintah saja tetapi juga dapat berupa pihak swasta atau suatu instansi yang tentunya dalam naungan suatu negara dan memiliki kepentingan atau tujuan yang sama dengan negara.

Hubungan bilateral merupakan keadaan yang menggambarkan hubungan timbal balik antara kedua belah pihak yang terlibat, dan aktor utama dalam pelaksanaan hubungan bilateral itu adalah negara (Perwita dan Yani, 2005:28).

Hubungan Bilateral erat kaitannya dengan kerja sama, tetapi tidak selalu berupa kerjasama, namun pada umumnya yang menjadi tujuan akhir dari hubungan bilateral adalah kerjasama. Menurut Kusumo Hamidjojo, hubungan bilateral merupakan suatu bentuk kerjasama diantara negara baik yang secara geografisnya berdekatan maupun tidak berdekatan secara geografis yang memiliki sasaran utama yaitu untuk menciptakan perdamaian, dengan memperhatikan kesaamaan politik kebudayaan dan struktur ekonomi.

Umumnya hubungan bilateral terjalin antar dua negara dengan kondisi diplomatiknya antar dua negara itu baik. Seperti yang terjadi antara Indonesia dan Laos yang dimana hubungan bilateral kedua negara ini telah merayakan yang ke 60

tahun pada 2017 silam. Hubungan bilateral yang telah terjalin sejak lama memperbesar kemungkinan akan keuntungan kedua negara dan meningkatkan interdependensi antar negara.

2.1.4. Diplomasi

Diplomasi merupakan media yang sangat berperan dalam melaksanakan *national Interest* suatu negara dalam menjalin hubungan bilateral atau pun multilateral. Diplomasi merupakan hubungan atau relasi, yang diartikan sebagai proses interaktif antar dua atau banyak negara maupun organisasi untuk menjalankan tujuan politik luar negeri negara masing-masing dan mencapai kepentingan nasionalnya. Istilah diplomasi seringkali disamakan dengan hubungan internasional atau masalah-masalah dunia, hubungan-hubungan luar negeri, cara melakukan hubungan luar negeri, implementasi hubungan luar negeri komunikasi dan negosiasi

Diplomasi adalah seni dalam bernegosiasi atau berunding yang dilakukan oleh seorang diplomat dengan pihak lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Arti diplomasi dapat juga didefinisikan sebagai cara untuk menyampaikan suatu pesan yang punya tujuan khusus melalui seorang diplomat dalam perundingan. Diplomasi sangat erat hubungannya dalam kegiatan politik luar negeri atau hubungan internasional dengan negara lain. Diplomasi secara sederhana dapat didefinisikan sebagai proses politik yang dengannya entitas politik, umumnya negara, melakukan hubungan-hubungan luar negeri satu sama lain dalam lingkungan internasional (Wijatmadja 2016, 147).

Diplomasi setidaknya mencakup 3 (tiga) fungsi utama diantaranya adalah perwakilan, negosiasi dan reporting. Pertama adalah perwakilan atau (*representation*) yang fungsi perwakilan dari para diplomat mencakup perwakilan substantive dan perwakilan simbolik. Kedua adalah negosiasi (*negotiation*) yaitu suatu proses dimana usulan-usulan yang eksplisit dimajukan dengan berbagai alasannya demi tujuan untuk mencapai kesepakatan tentang suatu pertukaran atau tentang kesadaran atas kepentingan bersama yang mana pada saat itu ada konflik kepentingan. Ketiga adalah reporting, yaitu mengumpulkan informasi dan memberikan informasi tersebut kepada pembuat keputusan negara merupakan aktifitas utama dari para diplomat dan misi diplomatik di luar negeri (Wijatmadja, 2016 : 148-150).

Kegiatan diplomasi dapat dilakukan antar dua negara atau *bilateral* dan juga dapat dilakukan dengan banyak negara atau *multilateral*. Pelaksanaan diplomasi bertujuan untuk menjalin, mempererat, dan meningkatkan hubungan antara suatu negara dengan negara lainnya demi mencapai tujuan bersama. Tujuan diplomasi menurut S.L.Roy terbagi menjadi 4 tujuan diantaranya adalah tujuan politik, tujuan ekonomi, tujuan kultur dan tujuan ideologi. Dalam tujuan politik, erat kaitannya dengan kebebasan dalam politik dan integritas territorial suatu negara. Pada tujuan ekonomi, tentunya sangat erat kaitannya dengan pembangunan nasional, kemudian tujuan ideologi yang berkaitan dengan mempertahankan ideologi suatu negara dan yang terakhir adalah tujuan kultur atau budaya yang dimana sangat erat kaitannya dengan upaya untuk memperkenalkan dan melestarikan kebudayaan suatu negara terhadap negara lain (<https://pendidikan.co.id/pengertian-diplomasi-fungsi-tujuan->

dan-ruang-lingkupnya-menurut-para-ahli/ diakses pada 18 April 2020). Dalam kasus penelitian ini adalah kelas Bahasa sebagai media atau bentuk upaya Indonesia dalam mengenalkan budaya Indonesia terhadap Laos.

Diplomasi selalu berhubungan dengan kegiatan politik luar negeri atau hubungan dengan negara lain. Hubungan tersebut umumnya diwakili oleh seorang diplomat yang tujuannya untuk membicarakan berbagai hal yang berkaitan dengan kepentingan negara. Berikut merupakan ruang lingkup diplomasi di Indonesia:

a. Kementerian Luar Negeri (KEMLU)

Umumnya Kementerian Luar Negeri berkedudukan di ibu kota negara pengirim. KEMLU bertanggungjawab atas politik luar negeri negara, hal ini dikarenakan berfungsi sebagai pihak yang mengatur politik luar negeri sebuah negara.

b. Perwakilan Diplomatik

Perwakilan diplomatik berkedudukan di dalam ibu kota negara lain. Fungsi dari perwakilan diplomatik tersebut adalah sebagai ‘penyambung lidah dan panca indera’ dari negara yang diwakilinya. Bentuk dari perwakilan diplomatik adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), Konsulat Jenderal Republik Indonesia (Konjen RI), Konsulat RI, Perutusan Tetap RI pada PBB, maupun Perwakilan RI tertentu yang bersifat sementara (<https://kemlu.go.id/portal/id/kedutaan> diakses pada 18 April 2020).

Kedutaan besar atau korps perwakilan diplomatik merupakan representatif dan perwakilan resmi suatu negara yang ditempatkan di ibu kota negara yang memiliki hubungan bilateral yang kuat dengan negara tersebut. Kedutaan pada

umumnya memiliki tujuan yaitu berusaha untuk menyokong atau mendukung yang menjadi kepentingan nasional negaranya dengan berbagai cara misalnya dilakukannya korespondensi, me-lobi, melakukan kunjungan-kunjungan baik resmi atau pun tidak, mengadakan dan menghadiri berbagai kegiatan dan aktifitas terkait lainnya (Hilmi, 2016 : 3). Korps perwakilan diplomatik dipimpin oleh seorang Duta Besar sedangkan korps perwakilan konsuler dipimpin oleh seorang Konsul Jendral. Duta Besar bertindak sebagai juru bicara pemerintahnya dan berungsi sebagai saluran komunikasi antara negaranya dengan negara tempat ia bertugas (<https://kemlu.go.id/portal/id/kedutaan> diakses pada 17 April 20).

2.1.5. Diplomasi Kebudayaan

Diplomasi yang merupakan media atau alat, digunakan oleh negara, perwakilan resmi dan lain-lain dalam menjalin hubungan diplomatik, dalam melaksanakan diplomasi, terdapat dua cara yaitu menggunakan *soft power diplomacy* dan *hard power diplomacy*. Hadirnya *soft power diplomacy* merupakan salahsatu bukti dari ke-dinamisan ilmu hubungan internasional. Pada era modern, berdiplomasi menggunakan *soft power diplomacy* merupakan suatu hal yang dianjurkan. Diplomasi dengan cara konvensional sudah banyak ditinggalkan karena dinilai kurang efektif.

Joseph Nye membagi konsep power menjadi dua, *hard power* dan *soft power*. Dalam melaksanakan diplomasi, terdapat dua cara yaitu menggunakan *soft power diplomacy* dan *hard power diplomacy*. *Soft power diplomacy* adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mendapatkan hasil yang

diinginkan melalui atraksi daripada paksaan atau pembayaran. Kekuatan lunak suatu negara bergantung pada sumber daya budaya, nilai-nilai, dan kebijakannya (<https://www.jstor.org/stable/25097996?seq=1> diakses pada 19/4/ 2020) dan hard power diplomacy merupakan kebalikan daripada soft power itu sendiri hard power sebagai kekuatan koersif yang dipegang melalui bujukan atau ancaman. Hard power didasarkan pada intervensi militer, diplomasi koersif, dan sanksi ekonomi dan bergantung pada sumber daya berwujud seperti angkatan bersenjata atau sarana ekonomi (Gallarotti, 2011 : 29).

Dapat disimpulkan bahwa, *soft power diplomacy* dinilai sangat efektif terutama untuk mempercepat mencapai tujuan nasional suatu negara hal ini dikarenakan, *soft power diplomacy* membuat “target” tertarik, membutuhkan dan menginginkan tanpa harus melibatkan kertepaksaan. Indonesia kemudian menggunakan kesempatan ini sebagai alat untuk mencapai tunjuan dan kepentingan nasionalnya.

Diplomasi kebudayaan merupakan bagian dari *soft power diplomacy* dan merupakan strategi yang efektif, sebab budaya merupakan sumber *softer power* yang sangat penting. Diplomasi kebudayaan adalah usaha atau upaya negara untuk memenuhi kepentingannya melalui pertukaran budaya seperti Pendidikan, sains, olah raga dan seni yang dilakukam antar dua atau lebih kelompok budaya yang dijalankankan dalam rangka memperkuat kerjasama antar kelompok dan memajukan kepentingan Bersama (<https://kebudayaan.kemdikbud. go.id/ditwdb /pedoman-diplomasi-budaya/> diakses pada 9 April 2020). Diplomasi kebudayaan dinilai efektif untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara karena tidak

melibatkan paksaan dan diplomasi budaya dinilai dapat memperkaya strategi dan sarana dalam memperkaya hubungan antar bangsa.

Diplomasi kebudayaan menurut Tulus Warsito dan Wahuyi Kartikasari dalam bukunya yang berjudul “Diplomasi Kebudayaan, Konsep dan Relevansi bagi Negara Berkembang : Studi Kasus Indonesia” bahwa diplomasi kebudayaan merupakan salahsatu dari banyak macam diplomasi yang memiliki arti atau pengertian sebagai usaha negara untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya melalui aspek kebudayaan seperti yang sifatnya mikro yaitu ilmu pengetahuan, Pendidikan, kesenian, olahraga hingga yang bersifat makro propaganda yang mengikut sertakan masalah ideologi, nasionalisme, globalisasi dan lain sebagainya (Kartikasari. 2007: 2).

Aktor yang melakukan diplomasi kebudayaan mencakup hampir semua dapat menjadi aktor dalam diplomasi yang satu ini, bukan hanya aktor negara tetapi juga aktor non negara, kelompok, individu bahkan seluruh warga negara dapat menjadi bagian dari aktor diplomasi budaya atau kebudayaan sehingga hubungan diplomasi budaya atau kebudayaan antar bangsa atau negara tidak hanya terjadi antara pemerintahannya saja. Adapun tujuan dari diplomasi kebudayaan adalah untuk mempengaruhi pendapat umum yang bertujuan untuk mendukung suatu kebijakan politik luar negeri tertentu hal ini dikarenakan sasaran diplomasi kebudayaan adalah pendapat umum baik itu pada tingkat nasional ataupun internasional (Kartikasari. 2007 : 4).

Bentuk diplomasi kebudayaan mengutip dari buku yang ditulis oleh Tulus Warsito dan Wahuyi Kartikasari dalam bukunya yang berjudul “Diplomasi

Kebudayaan, Konsep dan Relevansi bagi Negara Berkembang : Studi Kasus Indonesia”, yang pertama adalah eksibisi atau pameran dengan menampilkan segala sesuatu terkait suatu bangsa terhadap bangsa lain. Diplomasi kebudayaan melalui eksibisi atau pameran dikatakan sebagai diplomasi kebudayaan konvensional. Yang kedua adalah propaganda yaitu dengan penyebaran informasi mengenai suatu bangsa terhadap bangsa lain namun dilakukan tidak secara langsung. Ketiga adalah melalui Kompetisi atau pertandingan kemudian yang keempat adalah melalui penetrasi atau perembesan yang dilakukan melalui bidang perdagangan, militer dan ideologi. Kelima adalah melalui negoisasi, negosiasi berkaitan dengan untuk saling memperkenalkan, mengakui, menghormati dan menghargai kebudayaan masing-masing negara tersebut. Yang terakhir adalah melalui pertukaran ahli, pertukaran ahli mencakup kegiatan seperti kerjasama beasiswa antar negara hingga pertukaran ahli dalam bidang tertentu. Selain daripada yang telah disebutkan diatas masih terdapat bentuk-bentuk lain dari diplomasi kebudayaan seperti terorisme dan lain sebagainya (Kartikasari. 2007 : 127).

2.1.6. Bahasa dan Diplomasi

Bahasa merupakan suatu hal yang sangat melekat dengan kehidupan bermasyarakat dan merupakan sarana komunikasi yang sangat penting untuk dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Pengertian Bahasa dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer, yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri (diakses dari <https://kbbi.web.id/bahasa> pada 2 Juni 2020).

Bahasa dan diplomasi memiliki kaitan yang melekat satu sama lain karena pada proses pelaksanaan politik luar negeri, penyebaran Bahasa dapat melayani beberapa tujuan praktis yaitu dengan pengetahuan tentang Bahasa suatu negara membuat ide dan informasi yang disebar oleh negara tersebut dapat lebih mudah untuk diakses oleh orang dari mancanegara. Hal ini tentu mencerminkan peranan penting penyebaran Bahasa suatu negara dalam pelaksanaan politik luar negeri suatu negara. Bahasa sendiri merupakan bagian dari kekuatan lunak (*soft power*) suatu negara hal ini karena peranan yang dimiliki Bahasa sangat penting apabila fungsinya dioptimalkan karena Bahasa merupakan jati diri atau identitas suatu negara yang mencerminkan masyarakat dan budayanya.

Pada dasarnya diplomasi merupakan proses komunikasi dua arah untuk mempromosikan citra dan nilai-nilai bangsa dan disini Bahasa memainkan peran besar. Bahasa bagian dari diplomasi tercermin dengan peristiwa yang telah dan tengah berlalu seperti Bahasa Perancis yang dominan digunakan sebagai Bahasa diplomatik pada pertengahan pertama abad ke-20. Kemudian, sebagai cara khusus untuk mengungkapkan kebutuhan halus dari profesi diplomatik (Das, 2019 : 10). Bahasa merupakan alat yang kompleks tidak hanya sekedar sarana untuk bertukar pikiran atau transmisi pikiran atau instrument komunikasi, tetapi bahasa sangat sering menjadi inti dari panggilan diplomatik, disinilah tercermin pentingnya penggunaan bahasa dalam diplomasi.

Peran yang dimiliki bahasa sangat penting karena di dunia internasional, bahasa dapat mengangkat martabat bangsa dan membangun citra bangsa dengan begitu suatu negara akan diakui dan dihargai keberadaannya dan hal ini tentu akan

berimbang baik pada daya tawar negara itu sendiri. Dengan begitu, suatu negara dapat memberikan pengaruh yang lebih besar di forum internasional.

Bahasa nasional merupakan identitas suatu bangsa dan jati diri bangsa, hal ini dapat menarik negara lain untuk mempelajari budaya yang dimiliki oleh negara bersangkutan dan hal ini menjadikan bahasa sebagai sarana untuk memperkenalkan dan mempromosikan suatu negara di kancah internasional, serta untuk memperlihatkan keunggulan dalam bidang kebudayaan yang dalam kasus penelitian ini adalah di Laos, sehingga negara bersangkutan lebih dikenal.

2.2. Kerangka Pemikiran

Hubungan Internasional merupakan studi yang mempelajari mengenai interaksi lintas negara. Namun pada perkembangannya, interaksi tersebut tidak hanya dilakukan oleh *state actors* melainkan setiap individu dapat melakukan interaksi karena mempunyai peranan dalam Hubungan Internasional. Setiap negara memiliki kepentingan nasionalnya karena kepentingan nasional merupakan hal yang penting bagi suatu negara dalam hubungan internasional. Bentuk dari kepentingan nasional adalah hubungan diplomatik dan pencapaian kepentingan nasional salah satunya adalah melalui program-program pemerintah dan kerja sama internasional.

Hubungan Bilateral yang terjalin antar Indonesia dengan Laos telah berlangsung lebih dari setengah abad banyak peluang-peluang yang menguntungkan telah diraih oleh kedua negara ini sesuai dengan tujuan dari masing-masing negara. Hubungan Bilateral erat kaitannya dengan kerja sama,

tetapi tidak selalu berupa kerja sama, namun pada umumnya yang menjadi tujuan akhir dari hubungan bilateral adalah kerjasama.

Dalam kasus penelitiannya ini, program kelas Bahasa yang merupakan salah satu program yang terdapat di KBRI Vientiane merupakan bentuk upaya KBRI Vientiane untuk semakin memperkenalkan Indonesia terhadap Laos melalui *people-to-people contact*. Dengan begitu masyarakat Laos dapat lebih mengenal Indonesia dengan mengalami “ke-Indonesiaannya” secara langsung hal ini dilakukan untuk semakin memper-erat hubungan bilateral Indonesia – Laos serta untuk semakin memperkaya dan memperluas strategi dan kerja sama antara Indonesia dan Laos.

Dengan melihat dari presepektif untuk memperkenalkan Indonesia di Laos, program Kelas Bahasa yang dilaksanakan KBRI dengan bekerja sama dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Departmen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, kelas Bahasa memiliki peranan yang penting dalam upaya pelaksanaan diplomasi kebudayaan terhadap masyarakat Laos.



Gambar 2.1
Bagan Kerangka Pemikiran

Sumber: Di olah oleh Peneliti